

SATU MATERAI UNTUK DUA DUKUMEN 20 Pelamar Tak Lulus Administrasi Menyanggah

WONOSARI (KR) - Sebanyak 20 peserta dari 30 pelamar formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi menyampaikan sanggahan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul.

Sebagian besar mereka gagal seleksi administrasi karena menggunakan satu materai untuk dua dokumen yang berbeda. Tidak semua yang gagal lulus administrasi menyanggah, hanya 20 orang yang mengajukan sanggahan.

"Sekarang sedang dilakukan pencermatan isi sanggahannya dan belum ada keputusan ditolak



KR-Endar Widodo
Iskandar SIP MPA

atau diterima," kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul Iskandar SIP MPA didampingi Kabid Formasi Farid M Farid Jnni Haryanto SE, Rabu (6/11). Jumlah pelamar ada

1.875 orang memperebutkan 499 formasi, tetapi sampai pendaftaran ditutup ada 24 formasi tidak terisi, tenaga teknis 17 formasi dan tenaga kesehatan 7 formasi. Sebanyak 30 pelamar dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, selanjutnya mereka yang tidak lulus diberikan waktu tiga hari (2-4 November) untuk melakukan sanggahan.

Secepatnya akan segera diputuskan sanggahan diterima atau ditolak. Peserta yang lolos administrasi akan mengikuti test kompetensi dasar (TKD) yang waktu dan tempatnya akan diumumkan nomor 2 berupa uang tunai Rp 10 juta dan barang senilai Rp 257.210.000,- Pasangan nomor urut 3 uang tunai Rp 10 juta dan tidak ada sumbangan barang. Data ini merupakan laporan awal kampanye dan nanti akan dilaporkan lagi pada akhir kampanye. (Ewi)

LSDK PASLON PILKADA TERBANYAK Endah-Joko Senilai Rp 585,53 Juta

WONOSARI (KR) - Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul ketiga pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati sudah menyampaikan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LSDK). Jumlah terbanyak dilaporkan oleh pasangan Endah Subekti Kuntariningsih - Joko Parwoto senilai Rp 585.530.000,- Sementara laporan yang paling sedikit pasangan Sunaryanta-Mahmud Ardi sebesar Rp 10 juta. Sedangkan pasangan Sutrisna Wibawa - Sumanto sebesar Rp 267.210.000,- Demikian diumumkan

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul Asih Nuryanti, beberapa hari lalu.

Secara rinci dari LPDK pasangan nomor urut 1, sumbangan berasal dari pasangan calon, berwujud uang tunai Rp 50 juta dan berupa barang senilai Rp 535.530.000,- Sedangkan pasangan nomor urut 2 berupa uang tunai Rp 10 juta dan barang senilai Rp 257.210.000,- Pasangan nomor urut 3 uang tunai Rp 10 juta dan tidak ada sumbangan barang. Data ini merupakan laporan awal kampanye dan nanti akan dilaporkan lagi pada akhir kampanye. (Ewi)

'Gembira Beragama', Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme

WATES (KR) - Terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Penyebaran paham radikal terorisme hingga saat ini terus menyebar di masyarakat bahkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jaringan terorisme global, khususnya ISIS dan AlQaeda beserta afiliasinya, masih terus menebar ancaman secara global termasuk di Indonesia.

Begitu juga Jamaah Islamiyah terus melakukan rekrutmen, kajian dan pelatihan untuk penguatan organisasi mereka yang tersebar melalui kelompok-kelompok kecil di daerah, terutama melalui lembaga pendidikan, keagamaan dan kepemudaan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *leading sector* dalam penanggulangan terorisme di Indonesia mengkoordinasikan seluruh Kementerian dan Lembaga melaksanakan strategi nasional penanggulangan terorisme guna mewujudkan ketahanan publik melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Sehingga terwujud keterlibatan masyarakat yang didukung kolaborasi seluruh komponen bangsa.

"Sehingga setiap warga

Negara memiliki daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap bahaya ideologi kekerasan, radikalisme dan terorisme," kata Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY, Dewo Isnur Broto Imam Santoso SH pada acara Gerakan Muda Bangsa Beragama dan Beragama 'Gembira Beragama' di Aula Field Research Center (FRC) UGM, Wates, Kulonprogo, Rabu (6/11).

Hasil riset BNPT 2023 menunjukkan pergerakan penyebaran paham radikal terorisme dengan berbagai pemahaman keagamaan merambah kelompok perempuan, anak dan remaja/Generasi Z melalui berbagai modusnya baik secara *online* maupun *offline*.



KR-Asrul Sani
Para pembicara 'Gembira Beragama' bersama peserta salam tolak paham radikalisme dan terorisme.

Masuk ranah politik mengubah pendekatan dari *hard* jadi *soft approach* dari strategi *bullet* jadi *ballot strategy* atau dari peluru ke sosial.

Sepanjang 2023 juga terdapat 2.670 temuan konten digital bermuatan Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, Terorisme (IRET). "Kami berharap para tokoh muda lintas agama memiliki dayaimun dan mampu melakukan kontra pemahaman terhadap paham radikal terorisme," katanya.

Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Kol Sus Dr Harianto menegaskan, Gembira Beragama menjadi upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. (Rul)

SOAL ISU TRASE TOL RUAS KEBONREJO Pemkab Upayakan Tak Ada Perubahan

WATES (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo akan mengupayakan agar rencana trase tol Yogya - YIA ruas Kebonrejo, Temon, Kulonprogo tidak berubah, bahkan kalau memungkinkan diperluas. *Trase* yakni rencana tapak jalur kereta api yang titik-titik koordinatnya sudah diketahui.

Hal tersebut terungkap saat Paguyuban Warga Terdampak Tol Yogya-YIA ruas Kebonrejo, Temon menyampaikan aspirasi pada Pemkab Kulonprogo. "Intinya terkait usulan atau aspirasi dari warga untuk *trase* tetap di sana. Bu Pj. Bupati menyampaikan akan diupayakan, jadi ada modifikasi *trase* diperluas, usulan atau masukan kita itu," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Ir Muh Aris Nugroho usai

pertemuan di Kompleks Kantor Bupati setempat, Selasa (5/11).

Paguyuban Warga Terdampak Tol Yogya - YIA ruas Kebonrejo, mendatangi Pemkab Kulonprogo guna mencari kejelasan soal isu perubahan *trase* tol. Karena muncul isu yang tidak sesuai hasil sosialisasi dan konsultasi publik yang digelar pemangku kebijakan pada 24 Mei 2023 silam. Dalam sosialisasi, pejabat berwenang menyatakan penetapan lokasi tol di Kebonrejo sudah final sehingga ti-



KR-Asrul Sani
Ir Muh Aris Nugroho

tidak akan ada perubahan.

Hal lain yang membuat warga resah lantaran mereka sudah terlanjur mengeluarkan biaya untuk mendapatkan hunian baru.

"Jadi kita menampung aspirasi warga, kemudian dari sisi konsep di situ pengembangan *exit* tol diupayakan benar-benar membawa dampak pada masyarakat secara umum, ini tetap jadi misi kita. Harap-

annya *win-win solution*. Jadi kita usulkan (perluasan *trase*) dan itu memang perlu proses," jelas Aris.

Yang dimaksudkan perluasan *trase* adalah menambah *trase* yang ada. Sehingga *trase* yang sebelumnya sudah ditetapkan di wilayah Kebonrejo tidak akan berubah.

Mengenai warga terdampak yang sudah terlanjur meminjam uang di bank untuk mendapatkan lahan baru. Pemkab Kulonprogo akan coba mencari solusi dengan bank yang bersangkutan.

Warga terdampak tol Yogya - YIA ruas Kebonrejo secara tegas menolak wacana perubahan *trase* tol, karena sejumlah alasan. Salah satunya terlanjur mengeluarkan biaya untuk mendapatkan hunian baru. (Rul)

ANTISIPASI PEMBUANGAN DARI LUAR DAERAH

Pemkab Bentuk Satgas Siaga Sampah

WONOSARI (KR) - Kapanewon Patuk, Panggang dan Purwosari Kabupaten Gunungkidul berpotensi dijadikan pintu gerbang pembuangan sampah dari luar daerah. Untuk mengantisipasi terjadinya kiriman sampah luar daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk satuan tugas (Satgas) siaga sampah mengantisipasi masuknya sampah kiriman setelah penutupan Tempat Pembuangan Akhir Piyungan di Bantul pada Mei 2024.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul A Harry Sukmono mengatakan dengan dikeluarkannya Surat Gubernur Nomor 658/11898 tentang Desentralisasi Pengelolaan Sampah di kabupaten/kota se-DIY tertanggal 19 Oktober 2023, maka Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta akan mengelola sampah secara mandiri yang selama ini

dikelola regional provinsi DIY. "Untuk mengantisipasi masuknya sampah ke Gunungkidul, maka dibentuklah Satgas Sampah Kabupaten Gunungkidul," katanya.

Setelah dikeluarkannya Surat Gubernur Nomor 658/11898, TPA Piyungan ditutup permanen ternyata, Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta belum mengeluarkan surat keputusan darurat sampah dan membentuk satgas darurat sampah.

Mengingat pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik maka sampah dari tiga kabupaten/kota tersebut berpotensi dibuang ke Kabupaten Gunungkidul melalui Kapanewon Patuk dan Panggang Purwosari. Permasalahan sampah di Gunungkidul juga semakin dinamis dalam hal varian dan jumlahnya linear dengan memproduksi sekitar 0,49 kilogram sampah per orang per hari, masih le-

bih rendah dari rata-rata nasional yaitu 0,68.

Untuk Kabupaten Gunungkidul telah memiliki regulasi dalam pengelolaan sampah baik berupa perda maupun perbup, yakni Perda Nomor 14 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perbup 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan tersebut telah sejalan implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah DIY yaitu, mengubah paradigma pengelolaan sampah dari material yang tidak bermanfaat menjadi material yang memiliki nilai manfaat lebih untuk mendukung peningkatan ekonomi di masyarakat. (Bmp)

MAMPU HASILKAN 6 TON

Fasilitas Penggilingan Padi Direvitalisasi

WATES (KR) - *Rice Milling Unit* (RMU) atau Alat penggilingan padi di Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Wates, Kulonprogo direvitalisasi. Dengan direvitalisasinya fasilitas tersebut maka RMU bisa bekerja selama 10 jam dalam sehari. "Selama 10 jam tersebut, kapasitas produksinya bisa mencapai lima hingga enam ton," kata Seksi Usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngestiharjo, Sahadadi Mulyono, Selasa (5/11).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo merevitalisasi fasilitas RMU tersebut tentu akan semakin mengoptimalkan hasil panen padi di Ngestiharjo. Sebelumnya, petani mengolah padi menjadi gabah kering giling secara manual yaitu dijemur. Cara manual tersebut memiliki kelemahan, saat hujan gabah yang dijemur bisa mengalami ke-

rusakan. Sehingga membuat harga gabah kering giling di tingkat petani jadi anjlok.

Dengan adanya fasilitas RMU akan membuat proses penggilingan menjadi lebih maksimal. Hasil penggilingan bisa disimpan sebagai cadangan saat masa panen sudah lewat agar tetap bisa dijual. "Jadi harganya tetap stabil dan harga beras juga tetap aman," jelas Sahadadi.

Selain itu keberadaan RMU juga bisa membuat Gapoktan Ngestiharjo memproduksi beras sendiri. Apalagi wilayah Kalurahan Ngestiharjo memang dikenal sebagai salah satu sentra padi di Kulonprogo.

Gapoktan Ngestiharjo akan membeli padi hasil panen dengan harga lebih tinggi dari pemerintah. Tapi beras yang diproduksi akan tetap dijual di kisaran Rp 12 ribu perkilogram (kg).



KR-Asrul Sani
Penjabat Bupati Kulonprogo Srie Nurkyatsiwi menyaksikan penimbangan Cabai PaKu di KT Wahana Tani, Gupit, Karangsewu, Galur.

"Kami hanya mengambil sedikit keuntungan, yang penting petani bisa memiliki tambahan pendapatan dan masyarakat bisa membeli beras dengan harga terjangkau," ujarnya.

Sementara itu Pj. Bupati Kulonprogo Srie Nurkyatsiwi yang hadir langsung meresmikan fasilitas RMU Ngestiharjo mengatakan, RMU berikut pendukung-

nya dibangun dengan biaya Rp 455 juta yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian, APBD Kulonprogo 2024.

Siwi berpesan Gapoktan Ngestiharjo memanfaatkan fasilitas RMU secara optimal. Termasuk merawatnya agar mesin penggilingan bisa terus dimanfaatkan. (Rul)

DISKOMINFO SOSIALISASI 'SIPEDET CANTIK'

Sinergitas Data Sosial Ekonomi Tingkat Kalurahan

WATES (KR) - Menuju sinergitas data sosial ekonomi di tingkat Kalurahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menggelar Rapat Koordinasi Daerah dan Sosialisasi Sistem Pendataan Desa Cinta Statistik (Sipedet Cantik) Kabupaten Kulonprogo di Gedung Adikarta Kantor Pemkab setempat, Senin (4/11).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kulonprogo, Agung Kurniawan menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari program kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga Kabupaten Kulonprogo 2024 bersumber Dana Keistimewaan sekaligus tindak lanjut Program kerja sama antara Pami-

radya Kaistimewaan dan Badan Pusat Statistik DIY.

"Kegiatan ini untuk memberikan informasi pada perangkat daerah, pamenew, lurah dan seluruh warga tentang Pelaksanaan Pendataan Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga. Tujuannya memberikan pengetahuan pada pe-

serta mengenai pentingnya data dalam pembangunan dan reformasi kalurahan serta memberikan gambaran teknis pelaksanaan pendataan sosial ekonomi berbasis keluarga," kata Agung.

Proses Pendataan Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga sudah dimulai awal

Oktober yaitu koordinasi, penyusunan buku panduan, penyusunan data sasaran, rekrutmen petugas pendataan kemudian sosialisasi. "Kemudian akan dilanjutkan sosialisasi di 12 kalurahan di Kapanewon Pengasih dan Kokap. Selanjutnya bimbingan teknis untuk petugas pelatih dan juga petugas pendata," terang Agung.

Pendataan 15 November dan 15 Desember 2024 akan dilaksanakan di dua kapanewon, Kapanewon Pengasih dan Kokap di seluruh kalurahan dengan jumlah sasaran 19.119 KK untuk Kapanewon Pengasih dan 12.608 KK untuk Kapanewon Kokap dengan melibatkan 235 petugas pendata PPL dan PML. (Rul)



KR-Asrul Sani
Agung Kurniawan (kanan) dan Sutarman Meng sosialisasi Sipedet Cantik.

PEMKAB GUNUNGKIDUL Tetapkan Target PAD 2025 Rp 345,4 Miliar

WONOSARI (KR) -Pemkab Gunungkidul menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun anggaran 2025 sebesar Rp 345,4 miliar. Kenaikan PAD tersebut mengikuti penambahan jenis pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Dalam UU tersebut, ada penambahan jenis pajak, yaitu opsi (pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu). Opsen dikenakan atas pajak terutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

"Opsen PKB dan BBNKB itu semula bagi hasil dengan Provinsi, sekarang masuk pajak daerah kabupaten," kata Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono.

Untuk komponen MBLB awalnya tidak ada. Saat ini, Pemda DIY mendapat opsi Mineral Bukan Logam dan Batuan BKAD

Gunungkidul mencatat per tanggal 30 September 2024 untuk capaian PAD dari berbagai jenis pajak daerah mencapai Rp 68,9 miliar atau 91 persen dari target Rp 85 miliar.

Terdapat 11 jenis pajak yaitu Pajak Hotel (PH), Pajak Restoran (PR), Pajak Hiburan (PHR), Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB P2, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Sementara untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui pendataan objek pajak baru, pemuktahiran data pajak daerah dan penggalian sumber-sumber pajak baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan teras BKAD melakukan sebagai upaya mendorong PAD. "Khusus Dinas Perhubungan (Dishub) juga telah menetapkan target PAD dari retribusi parkir 2024 sebesar Rp 2,2 miliar," ujarnya. (Bmp)